



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA

Jln Balai Polam No.2 Kel Tj Gadang Kec Payakumbuh Barat ☎ (0752) 92790

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 31 /SK/DP3A&P2KB-PYK/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017 - 2022

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing ;
 - b. bahwa dalam perkembangannya sejalan dengan kebutuhan teknis dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama OPD DP3A&P2KB Tahun 2017-2022 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2) ;

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 ;
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana;
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah daerah

4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD
6. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh
7. Kinerja Organisasi Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai sengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan ;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pasal 3

1. Ruang lingkup IKU yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah IKU OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.
2. IKU OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan rencana strategis OPD Tahun 2017-2022 .
- (2) IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat keputusan ini dilakukan oleh Kepala OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : Mei 2018

**KEPALA DP3A&P2KB KOTA
PAYAKUMBUH**



Drs. SYAHNADEL KHAIRI
NIP. 19610903 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bpk Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

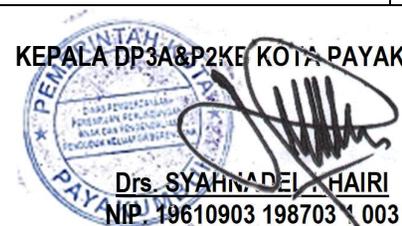
Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks/ Skor	Sesuai dengan Renstra K/L Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sasaran pembangunan nasional	$1/3 \times (\text{Angka harapan hidup} + \text{angka harapan pendidikan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$	BPS / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks/ Skor	Sesuai dengan Renstra K/L Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.	$1/3 \times (\text{Indeks keterwakilan perempuan di parlemen} + \text{indeks pengambilan keputusan} + \text{indeks distribusi pendapatan})$	BPS / Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Indikator keberhasilan pencapaian Pemberdayaan Perempuan (kesetaraan Gender) dan sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Capaian Kategori Anugerah Parahita Ekapraya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Meningkatnya Implementasi Kota layak Anak	Tingkat Kategori Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Indikator keberhasilan pencapaian indikator Kota Layak Anak dan sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Capaian Kategori Kota Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tindak pidana TPPO	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dan Sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	$\text{Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan} / \text{jumlah perempuan} \times 100$	DP3AP2KB Kota Payakumbuh
		Persentase Kekerasan terhadap Anak	Persentase	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dan Sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	$\text{Jumlah Kekerasan anak} / \text{jumlah anak} \times 100$	DP3AP2KB Kota Payakumbuh

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase Penanganan Kasus terhadap Perempuan dan Anak, termasuk TPPO	Persentase	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, dan Sesuai sasaran daerah Kota Payakumbuh	Jumlah penanganan kasus/ jumlah seluruh kasus	DP3AP2KB Kota Payakumbuh
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana	Rasio Penggunaan Kontrasepsi/ Contraceptive Prevalency Ratio (CPR)	Rata-rata penggunaan kontrasepsi	Selaras dengan sasaran BKKBN Perwakilan Sumatera Barat, Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dibagi jumlah seluruh PUS dikali 100	DP3AP2KB Kota Payakumbuh
5	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	(Hasil pelayanan KKBPK/Sasaran pelayanan KKBPK)*100	DP3AP2KB Kota Payakumbuh
6.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Sesuai dengan sasaran daerah Kota Payakumbuh	Hasil evaluasi inspektorat	Inspektorat Kota Payakumbuh

KEPALA DP3A&P2KE KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAHNADEL HAIRI
NIP. 19610903 198703 1 003



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA**

Jln. Balai Polam No.2 Kel Tj. Gadang Kec. Payakumbuh Barat ☎ (0752) 92790

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA
PAYAKUMBUH**

Nomor : /SK/DP3A&P2,KB-PYK/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh;
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh seluruh pejabat dan pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum pertama wajib dilaporkan kepada Walikota Payakumbuh.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAHNADEL KHAIRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19610903 198703 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Walikota Payakumbuh
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
3. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
5. Sdr. Kepala DPKA Kota Payakumbuh
6. Sdr. Kepala Bagian Dalbang Kota Payakumbuh
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kota Payakumbuh

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
- Tugas : Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana
- Fungsi : a Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana
- b Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana
- c Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana
- d Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya peran dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) - Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 	<p>$1/3 \times (\text{Angka Harapan Hidup} + \text{Angka Harapan Pendidikan} + \text{Indeks Distribusi Pendapatan})$</p> <p>$1/3 \times (\text{Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen} + \text{Indeks Pengambilan Keputusan} + \text{Indeks Distribusi Pendapatan})$</p> <p>Penilaian Kategori APE</p>	<p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan BPS</p> <p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>
2	Meningkatnya Implementasi kota Layak Anak	Tingkat Kategori kota Layak Anak	Penilaian Tingkat Kategori Kota Layak Anak	KEMEN-PP PA
3	Menurunnya angka kekerasan terhadap	- Persentase kekerasan terhadap perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan}}{\text{Jumlah Perempuan}} \times 100\%$	Data Simfoni (DP3AP2KB dan instansi terkait seperti

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	perempuan dan anak	- Persentase kekerasan terhadap anak - Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	$\frac{\text{Jumlah Kekerasan terhadap Anak}}{\text{Jumlah Anak}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Penanganan Kekerasan yang masuk}}{\text{Jumlah Penanganan Kekerasan}} \times 100\%$	LSM, Kepolisian)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana	CPR (Contraceptive Prevalency Ratio)	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 yang menggunakan suatu metode kontrasepsi}}{\text{jumlah seluruh PUS}} \times 100\%$	DP3AP2KB
5	Meningkatnya cakupan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Cakupan pelayanan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	$\frac{\text{Hasil Pelayanan KKBPK}}{\text{Sasaran Pelayanan KKBPK}} \times 100\%$	DP3AP2KB
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat	Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA**



Drs SYAHNADEL KHAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610903 198703 1 003



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA**

Jln. Balai Polam No.2 KelTj Gadang Kec Payakumbuh Barat ☎ (0752) 92790

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA
PAYAKUMBUH**

Nomor : /SK/DP3A&P2,KB-PYK/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PEJABAT ADMINISTRATOR DAN
PENGAWAS SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUMBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh ;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh ;
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh seluruh pejabat dan pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana diktum pertama wajib dilaporkan kepada Walikota Payakumbuh.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH



Drs. SYAHNADEL KHAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610903 198703 1 003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Walikota Payakumbuh
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
3. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kota Payakumbuh
5. Sdr. Kepala DPKA Kota Payakumbuh
6. Sdr. Kepala Bagian Dalbang Kota Payakumbuh
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kota Payakumbuh

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Sekretaris

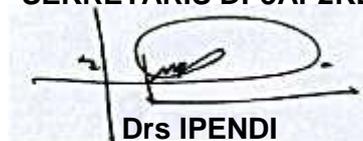
Tugas : Merencanakan operasional, mengelola, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- b Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- c Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas
- e Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas
- f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai IKM Perangkat Daerah	DP3AP2KB
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Sasaran Program dan Kegiatan Renja yang selaras Dengan Renstra}}{\text{Jumlah sasaran Program dan kegiatan Renstra}} \times 100\%$	DP3AP2KB
3	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase TLHP yang diselesaikan oleh Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah TLHP yang diselesaikan Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah TLHP seluruhnya}} \times 100\%$	DP3AP2KB

SEKRETARIS DP3AP2KB



Drs IPENDI
Pembina Tk. I

NIP. 19681019 199403 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas : melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- Fungsi : a Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset
- b Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
- c Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian
- d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh sarana prasarana}} \times 100\%$	DP3AP2KB
2	Meningkatnya kualitas SDM perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja - Persentase ASN yang hadir tepat waktu 	$\frac{\text{Jumlah penempatan ASN sesuai Anjab}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah ASN yang hadir tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$	DP3AP2KB
3	Meningkatnya kualitas laporan aset perangkat daerah	Persentase Penyusunan Laporan Aset sesuai pedoman	$\frac{\text{Jumlah laporan aset sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Laporan Aset seluruhnya}} \times 100\%$	DP3AP2KB

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya layanan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengurusan KGB ASN tepat waktu - Persentase Pengurusan Bahan Kenaikan Pangkat ASN tepat waktu 	<p>Jumlah KGB ASN tepat waktu Jumlah KGB ASN X100%</p> <p>Jumlah KGB ASN tepat waktu Jumlah KGB ASN X100%</p>	DP3AP2KB

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



OKTAKRISNA, SKM

Penata Tk. I

NIP. 19801006 200501 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
 Tugas : Melaksanakan Pengelolaan sarana dan prasarana
 Fungsi : a Melaksanakan dan membantu Pengelolaan urusan, sarana prasarana, aset
 b Melaksanakan dan membantu Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
 c Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya penyusunan Laporan Aset Perangkat Daerah	<p>Persentase pengelolaan dan pengadministrasian Aset Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pedoman</p> <p>Persentase pembuatan laporan berkala Aset BMD sesuai pedoman dan tepat waktu</p> <p>Persentase pembuatan laporan persediaan barang sesuai pedoman</p>	<p>Jumlah pengelolaan dan pengadministrasian Aset Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pedoman X100</p> <p>Jumlah pengelolaan dan pengadministrasian Aset Barang Milik Daerah (BMD)</p> <p>Jumlah pembuatan laporan berkala Aset BMD sesuai pedoman X100</p> <p>Jumlah pembuatan laporan berkala Aset BMD seluruhnya</p> <p>Jumlah pembuatan laporan berkala Aset BMD sesuai pedoman X100</p> <p>Jumlah pembuatan laporan berkala Aset BMD seluruhnya</p>	DP3AP2KB

PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA



PEBBI VADILLAH

NIP. 19860213 200501 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengadministrasi Umum
 Tugas : Melaksanakan kegiatan administrasi umum
 Fungsi : a Melaksanakan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga
 b Melaksanakan Penyiapan bahan, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
 c Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar
 d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulas	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Terlaksananya pengadministrasi an Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen administrasi umum (kepegawaian) yang dibuat sesuai pedoman - jumlah dokumen surat masuk/ keluar sesuai pedoman - Jumlah surat yang dikelompokkan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya tepat sasaran - Persentase pendistribusian surat sesuai pedoman - Persentase pengarsipan surat sesuai pedoman 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen administrasi umum (kepegawaian) yang dibuat sesuai pedoman - jumlah dokumen surat masuk/ keluar sesuai pedoman - Jumlah surat yang dikelompokkan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya tepat sasaran <p>(Jumlah pendistribusian surat sesuai pedoman/ jumlah pendistribusian surat seluruhnya) X 100</p> <p>(Jumlah pendistribusian surat sesuai pedoman/ jumlah pendistribusian surat seluruhnya) X 100</p>	DP3AP2KB

PENGADMINISTRASIAN UMUM



NURIMANI

NIP. 19650512 200604 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Tugas : Melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas
- Fungsi : a Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas
- b Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas
- c Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Dinas
- d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai pedoman	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan}} \times 100\%$	DP3AP2KB
2	Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penyampaian LRA tepat waktu - Persentase Rekonsiliasi SKPD dan BUD tepat waktu - Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai pedoman 	$\frac{\text{Jumlah LRA yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah LRA yang dilaporkan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rekonsiliasi yang dilakukan dengan BKD}}{\text{Jumlah Rekonsiliasi yang dilakukan dengan BKD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang disusun}} \times 100\%$	DP3AP2KB
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian program dan kegiatan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan capaian program dan kegiatan yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Laporan capaian Program Kegiatan yang disusun}} \times 100\%$	DP3AP2KB

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun sesuai pedoman	Jumlah Dokumen Pelaporan yang disusun sesuai pedoman	DP3AP2KB
5	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik sesuai pedoman	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik sesuai pedoman	DP3AP2KB

**KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**



ROBER SENIA, SE.Msi

Penata Tk. I

NIP. 19840910 201001 1 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
 Tugas : Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas
 Fungsi : a Melaksanakan penyiapan dan pelaporan keuangan
 b Melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan
 c Melaksanakan persiapan pelaporan program dan kegiatan sub bagian
 d Melaksanakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur dan kesejahteraan pegawai
 e Melaksanakan verifikasi, Keuangan Akuntansi dan Pelaporan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Keuangan - Persentase Pembuatan Laporan Keuangan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Keuangan - (Jumlah pembuatan laporan keuangan tepat waktu/ jumlah pembuatan laporan keuangan) X 100 	DP3AP2KB
	Terlaksananya proses administrasi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase dokumen administrasi keuangan yang dibuat sesuai pedoman 	<ul style="list-style-type: none"> - (Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dibuat sesuai pedoman/ Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dibuat) X 100 	DP3AP2KB
	Terlaksananya pengadiministrasian keuangan sesuai pedoman	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengajuan perubahan gaji tepat waktu - Persentase pembuatan dokumen administrasi keuangan sesuai pedoman 	<ul style="list-style-type: none"> - (Jumlah pengajuan perubahan gaji tepat waktu/ jumlah pengajuan perubahan gaji) X 100 - (Jumlah pembuatan dokumen administrasi keuangan sesuai pedoman/ Jumlah seluruh pembuatan dokumen administrasi keuangan) X 100 	DP3AP2KB

PENGADMINISTRASI KEUANGAN



AFRIANI RATIH

NIP. 19840407 200801 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengelola Database Surat Perintah Membayar Sub Bagian Program dan Keuangan
- Tugas : Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan di lingkup dinas
- Fungsi :
- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan (pengentrian belanja) melalui sistem SIPKD
 - b. Melaksanakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), Pengadaan Barang dan Jasa, Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
 - c. Melaksanakan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/TU/GU/LS di lingkup dinas
 - d. Menyiapkan dan membuat laporan fungsional / realisasi belanja manual dan sistem
 - e. Membuat laporan pajak
 - f. Mengarsipkan dokumen laporan untuk tertib administrasi keuangan dan pemeriksaan
 - g. Menyiapkan bahan- bahan sehubungan dengan pengadministrasian keuangan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Terlaksananya pengajuan SPM Keuangan	Persentase pengajuan database Surat Perintah Membayar sesuai pedoman	Jumlah data sekunder dan informasi perencanaan perangkat daerah yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis	DP3AP2KB
2	Terlaksananya proses keuangan melalui sistem SIPKD	- Jumlah pembuatan laporan fungsional SIPKD tepat waktu - Jumlah belanja yang dientrikan ke SIPKD	- Jumlah pembuatan laporan fungsional SIPKD tepat waktu - Jumlah belanja yang dientrikan ke SIPKD	DP3AP2KB
		- Persentase Pengentrian belanja ke sistem SIPKD sesuai pedoman - Persentase pembuatan laporan pajak ke SIPKD tepat waktu	(Jumlah laporan alternatif pemecahan permasalahan penyajian data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun) X 100 (Jumlah pembuatan laporan pajak ke SIPKD tepat waktu/ jumlah pembuatan laporan pajak seluruhnya) X 100	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembuatan LPJ UP SIPKD sesuai pedoman - Persentase pembuatan Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu - Persentase pembuatan Buku Bantu SIPKD sesuai pedoman 	<p>(Jumlah pembuatan LPJ UP SIPKD sesuai pedoman / Jumlah pembuatan LPJ UP SIPKD seluruhnya) X 100</p> <p>(Jumlah pembuatan Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu / Jumlah pembuatan Laporan Realisasi Anggaran seluruhnya) X 100</p>	

**PENGELOLA DATABASE SURAT
PERINTAH MEMBAYAR SUB
BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN**



MERRY DASRIYANTI, A.Md
NIP. 19870426 201001 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Bendahara
- Tugas : Melaksanakan penerimaan, penyimpanan uang dari UP, GU, TU dan LS dan pembayaran uang sesuai prosedur serta pemungutan pajak setiap transaksi keuangan
- Fungsi :
- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan (pengentrian belanja) melalui sistem SIPKD
 - b. Melaksanakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), Pengadaan Barang dan Jasa, Gaji dsan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
 - c. Melaksanakan Surat Perintah Membayar (SPM) UP/TU/GU/LS di lingkup dinas
 - d. Menyiapkan dan membuat laporan fungsional / realisasi belanja manual dan sistem
 - e. Membuat laporan pajak
 - f. Mengarsipkan dokumen laporan untuk tertib administrasi keuangan dan pemeriksaan
 - g. Menyiapkan bahan- bahan sehubungan dengan pengadministrasian keuangan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Terlaksananya pengajuan SPP keuangan	Persentase pengajuan SPP sesuai pedoman	(Jumlah SPP sesuai pedoman/ jumlah seluruh SPP) X 100	DP3AP2KB
2	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban uang persediaan bendahara	- Jumlah pembuatan laporan fungsional sesuai pedoman	- Jumlah pembuatan laporan fungsional sesuai pedoman	DP3AP2KB
		- Persentase pengajuan laporan fungsional tepat waktu	- (Jumlah laopran yang diajukan tepat waktu/ jumlah seluruh laporan fungsional) X 100	
		- Persentase Pembayaran Belanja sesuai pedoman	Persentase Pembayaran	DP3AP2KB
		- Persentase Pembuatan Buku Kas Umum sesuai pedoman		

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penutupan Buku Kas Umum tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai pedoman - Persentase pemungutan pajak sesuai pedoman - Persentase penyetoran pajak tepat waktu - Persentase pembuatan laporan pajak tepat waktu 		

BENDAHARA



ZH. AWALIBI MASRIL, S.Scs
NIP. 19840614 200604 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
- Tugas : Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas
- Fungsi :
- a. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan pembuatan Rencana Kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan/ hasil verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan.
 - c. Mengarsipkan dokumen SPJ untuk tertib administrasi keuangan dan pemeriksaan.
 - d. Menyiapkan bahan- bahan sehubungan dengan pengadministrasian keuangan.
 - e. Melaksanakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan.
 - f. Melaksanakan/ menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas.
 - g. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Terlaksananya keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase dokumen administrasi keuangan yang dibuat sesuai pedoman - Persentase dokumen belanja yang diverifikasi sesuai pedoman - Persentase pengajuan penyelesaian dokumen verifikasi dokumen belanja tepat waktu 	<p>(Jumlah dokumen administrasi keuangan yang dibuat sesuai pedoman/ jumlah seluruh dokumen administrasi keuangan) X 100</p> <p>(Jumlah dokumen belanja yang diverifikasi sesuai pedoman/ Jumlah dokumen belanja yang diverifikasi seluruhnya) X 100</p> <p>(Jumlah pengajuan penyelesaian dokumen verifikasi belanja tepat waktu / Jumlah pengajuan penyelesaian dokumen verifikasi belanja seluruhnya) X 100</p>	DP3AP2KB

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengisian lembar verifikasi sesuai pedoman - Persentase dokumen belanja yang disimpan sesuai pedoman 	<p>Jumlah pengisian lembar verifikasi sesuai pedoman/ jumlah pengisian lembar verifikasi seluruhnya) X 100</p>	

PENGADMINISTRASI KEUANGAN



MILA FERDINA

NIP. 19830212 201001 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tugas : Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - f. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - k. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - l. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
 - m. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas Tribina KB	Persentase BKB aktif	$\frac{\text{Jumlah BKB aktif}}{\text{Jumlah BKB}} \times 100$	DP3AP2KB
2	Meningkatnya keikutsertaan ber KB	Unmeetneed Cakupan peserta KB aktif	$\sum \text{PUS (TAK kb iat + tial)} \times 100$ (Peserta KB aktif / Pasangan usia subur) X 100	DP3AP2KB
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan posyandu	Persentase posyandu dengan strata mandiri	(Jumlah Posyandu Strata Mandiri) X 100	DP3AP2KB
4	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Unmeetneed	$\sum \text{PUS (TAK kb iat + tial)} \times 100$	DP3AP2KB

**KABID PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



dr. HERIJON, M. Kes
NIP. 19630524 200003 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penduduk

Tugas : Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengendalian Penduduk..

Fungsi :
a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kemampuan kader posyandu dalam pengelolaan Posyandu	Jumlah kader Posyandu aktif	Jumlah kader Posyandu aktif	DP3AP2KB
2	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan posyandu	Persentase Pelaporan posyandu yang tepat waktu	$(\text{Jumlah pelaporan posyandu tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh pelaporan Posyandu}) \times 100$	DP3AP2KB
3	Meningkatnya basis data pengendalian penduduk	Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun untuk parameter pengendalian penduduk	Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun untuk parameter pengendalian penduduk	DP3AP2KB

**KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
PENDUDUK**



IRVAN FIRDAUS, SKM

NIP. 19770821 199703 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengadministrasian Kependudukan
- Tugas : Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengendalian Penduduk..
- Fungsi : a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pengelolaan Posyandu	Jumlah kader Posyandu aktif	Jumlah kader Posyandu aktif	DP3AP2KB
2	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan kegiatan posyandu	Jumlah Pengelolaan pelaporan posyandu yang tepat waktu	Jumlah Pengelolaan pelaporan posyandu yang tepat waktu	DP3AP2KB
3	Terlaksananya penyusunan basis data pengendalian penduduk	Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun	Jumlah dokumen parameter dan profil kependudukan yang disusun	DP3AP2KB

PENGADMINISTRASIAN
KEPENDUDUKAN



BASMIATI

NIP. 19670828 200801 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
- Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Keluarga Sejahtera.
- Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Keluarga Sejahtera
b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Keluarga Sejahtera;
c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Sejahtera;
d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Keluarga Sejahtera;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pembinaan kader Tribina KB	Jumlah kader BKB yang dibayar Biaya Operasionalnya	Jumlah kader BKB yang dibayar Biaya Operasionalnya	DP3AP2KB
2	Meningkatnya operasional keluarga berencana	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dukungan operasional	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dukungan operasional	DP3AP2KB

**KEPALA SEKSI KELUARGA
SEJAHTERA**


Ns.YENNY MARDAWATI,S.Kep NIP.
NIP. 19690617 198912 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

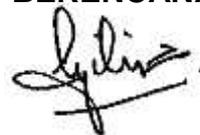
Jabatan : Kepala Seksi Keluarga Berencana

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Keluarga Berencana.

Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana;
d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Keluarga Berencana;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan KB dan alat kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kegiatan momentum strategis dengan mitra kerja KB- Jumlah Faskes KB yang memberikan pelayanan KB	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah kegiatan momentum strategis dengan mitra kerja KB- Jumlah Faskes KB yang memberikan pelayanan KB	DP3AP2KB
2	Meningkatnya upaya pembinaan oleh kader KB kepada akseptor KB	Jumlah Kader KB yang dibayarkan biaya operasional	Jumlah Kader KB yang dibayarkan biaya operasional	
3	Meningkatnya sarana dan prasarana untuk penyuluhan dan pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana pelayanan KB	

**KEPALA SEKSI KELUARGA
BERENCANA**



MILIZAR MUKHTAR, SKM, MKes.

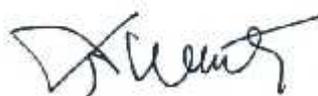
NIP. 19690608199403 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak
- Tugas : Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak.
- Fungsi : a Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
 b Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
 c Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
 d Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Anak;
 e Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formula	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap anak	Persentase kasus penanganan kekerasan terhadap anak	$(\text{Jumlah Penanganan kasus di P2TP2A} / \text{Jumlah_kasus yang masuk di P2TP2A}) \times 100$	DP3AP2KB
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak, partisipasi dan perlindungan anak	Jumlah pencapaian skor kota layak anak (KLA)	Jumlah pencapaian skor kota layak anak (KLA)	DP3AP2KB
3	Meningkatnya peran pemerintah dalam hal kebijakan terkait perlindungan anak	Jumlah Perwako /Himbauan/MOU terkait perlindungan anak	Jumlah Perwako /Himbauan/MOU terkait perlindungan anak	DP3AP2KB
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang implementasi kebijakan perlindungan anak	Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	DP3AP2KB

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK



HERMANTO, S.Sos

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak
- Tugas : Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Perlindungan Khusus Anak.
- Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatnya informasi tentang perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Stakeholder yang memahami informasi tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus (ABK) - Jumlah Stakeholder yang memahami informasi tentang perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH) - Jumlah anak yang mengikuti forum anak. - Jumlah lembaga masyarakat yang telah mendapatkan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Stakeholder yang memahami informasi tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus (ABK) - Jumlah Stakeholder yang memahami informasi tentang perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH) - Jumlah anak yang mengikuti forum anak. - Jumlah lembaga masyarakat yang telah mendapatkan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) 	DP3AP2KB
2	Meningkatnya fasilitasi penanganan Kasus kekerasan anak di P2TP2A	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak	DP3AP2KB

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK



NONI DESRITA, A.Md

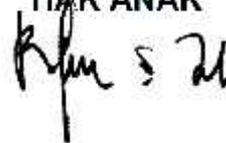
NIP. 19690301 199303 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
- Tugas : Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemenuhan Hak Anak
- Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak;
d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatnya pembentukan Kecamatan Layak Anak	Persentase pembentukan Kecamatan Layak Anak	(Jumlah pembentukan kecamatan layak anak/jumlah kecamatan seluruhnya) X 100	DP3AP2KB
2	Meningkatnya Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Persentase Pembentukan Kelurahan Layak Anak	(Jumlah pembentukan kecamatan layak anak/jumlah kecamatan seluruhnya) X 100	DP3AP2KB
3	Meningkatnya partisipasi dalam Pembangunan	- Jumlah anak yang aktif pada forum anak daerah - Jumlah pertemuan atau kegiatan yang diikuti oleh forum anak daerah kota payakumbuh	- Jumlah anak yang aktif pada forum anak daerah - Jumlah pertemuan atau kegiatan yang diikuti oleh forum anak daerah kota payakumbuh	DP3AP2KB

**KEPALA SEKSI PEMENUHAN
HAK ANAK**



RASYIDA SYAFRIANI

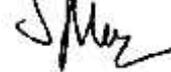
NIP. 19640501 198303 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Seksi Data Gender dan Anak
- Tugas : Seksi Data Gender dan Anak mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Data Gender dan Anak.
- Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Data Gender dan Anak;
b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Data Gender dan Anak;
c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Data Gender dan Anak;
d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Data Gender dan Anak;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Terpilah sebagai data dukung pembangunan	Jumlah Dokumen Profil Data Gender dan Anak yang disusun	Jumlah Dokumen Profil Data Gender dan Anak yang disusun	DP3AP2KB

**KEPALA SEKSI DATA GENDER
DAN ANAK**



MEDIAWARMAN, S.E
NIP. 19630911 199103 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : Kepala bidang pemberdayaan perempuan.

Tugas : Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi :

- a Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan	Persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif	(Jumlah Perempuan yang duduk di lembaga legislatif/Jumlah Anggota legislatif) X 100	DP3AP2KB
2	Meningkatnya peran perempuan dalam menunjang kesejahteraan keluarga	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	(Jumlah pelaku usaha ekonomi perempuan/ pelaku usaha ekonomi) x 100	DP3AP2KB
3	Meningkatnya peran kelembagaan dalam percepatan pengarusutamaan gender (PUG)	- Jumlah kelembagaan PUG - Persentase program dan kegiatan yang di PPRGkan	- Jumlah kelembagaan PUG - (jumlah Program dan kegiatan yang diPPRGkan/ Jumlah Program dan kegiatan yang dapat diPPRGkan) X 100	DP3AP2KB
4	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam organisasi	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	DP3AP2KB
5	Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan / Jumlah Kasus yang masuk P2TP2A	DP3AP2KB

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN



ERMA YUNITA S. Sos

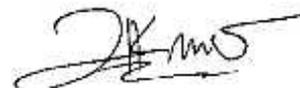
NIP. 19640417198602 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala seksi peningkatan kualitas hidup perempuan DP3A&P2KB
- Tugas : Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kualitas Hidup Perempuan.
- Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi	Jumlah organisasi perempuan yang di bina	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	DP3AP2KB
2	Meningkatnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi	Persentase perempuan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam event perempuan	(Jumlah Perempuan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam event perempuan/ Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam event Perempuan) X 100	DP3AP2KB

**KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.**



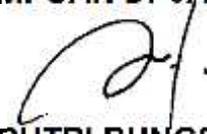
HERA KARTIKA, A
NIP. 19690418 199002 2 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala seksi Perlindungan Perempuan DP3A&P2KB
- Tugas : Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Perlindungan Perempuan.
- Fungsi : a Perencanaan program kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
b Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
c Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan;
d Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;
e Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam organisasi	Jumlah PKK yang Aktif	Jumlah PKK yang Aktif	DP3AP2KB
2	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan P2TP2A	Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	DP3AP2KB

**KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DP3A&P2KB**


ANGGI PUTRI BUNGSU, SSTP
NIP. 19851025 200412 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Seksi Kualitas Keluarga DP3A&P2KB
- Tugas : Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kualitas Keluarga.
- Fungsi : a. Perencanaan program kegiatan Seksi Kualitas Keluarga;
 b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Kualitas Keluarga;
 c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kualitas Keluarga;
 d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Kualitas Keluarga;
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perempuan Yang Memahami Pemberdayaan Perempuan Dibidang Politik, Hukum dan Sosial - Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perempuan Yang Memahami Pemberdayaan Perempuan Dibidang Politik, Hukum dan Sosial - Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia 	DP3AP2KB
2	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pengembangan Diri	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perempuan Inspiratif Yang Menginspirasi Perempuan Lain Dalam Pengembangan Diri - Jumlah Jenis Kreasi Atau Inovasi Rangkaian Peringatan Hari Ibu 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perempuan Inspiratif Yang Menginspirasi Perempuan Lain Dalam Pengembangan Diri - Jumlah Jenis Kreasi Atau Inovasi Rangkaian Peringatan Hari Ibu 	DP3AP2KB

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Yang Responsif Gender	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan PPRG	DP3AP2KB
4	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan PUG	Persentase pokja PUG yang mendapatkan pembinaan	(Jumlah Pokja PUG yang mendapatkan pembinaan/ Jumlah pokja PUG)	DP3AP2KB

KEPALA SEKSI KUALITAS KELUARGA



YUNIARMI, SH

NIP. 19630616 198303 2 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga
- Tugas : Seksi Kualitas Keluarga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kualitas Keluarga.
- Fungsi : a. Perencanaan program kegiatan Seksi Kualitas Keluarga;
b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Kualitas Keluarga;
c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kualitas Keluarga;
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Kualitas Keluarga;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum dan sosial	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial	DP3AP2KB
2	Terlaksananya advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	- Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif - Jenis rangkaian kegiatan hari ibu	- Jumlah peserta lomba perempuan inspiratif - Jenis rangkaian kegiatan hari ibu	DP3AP2KB
3	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan PPRG	Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG	Jumlah peserta PPRG yang mengikuti bimbingan dan pelatihan PPRG	DP3AP2KB

**PENGELOLA BINA
KESEJAHTERAA KELUARGA**



FAUZIAH, S.Kep

NIP. 19790716 199903 2 002